

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, Prawesti dan Dyah Setyaningrum.2013. Abstrak: Analisis Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Terkait Pengelolaan Aset Teta Pada Pemerintah Daerah/Kota/Kabupaten (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta). Fakultas Ekonomi, UI.
- Anshari, Efrizal Syofyan,2014: Abstrak: Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.
- Buletin, Teknis No 15 tentang Akutansi Aset Tetap, Komite Standar Akutansi Pemerintah
- Buletin, Teknis No 18 tentang Akutansi Penyusutan , Komite Standar Akutansi Pemerintah.
- BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran I dan II Tahun 2016
- BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016: Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2015.
- BadanPusat Statistik, 2016. Profil Daerah Provinsi Papua
- Creswell, Jhon, W. 2010. Terjemahan: ***Research DesignPendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed***. Pustaka Pelajar.Yogyakarta
- Dewi, Nur, M. Abstrak: Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari
- Dewi, Hilda, G. 2012. Tesis: Analisis Audit BPK-RI Atas Aset Tetap Pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, FE UI.
- Enda, Baisida Lauma, Jenny Morasa, Lintje Kalangi, 2016: Abstrak: Analisis Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolang Mongondow.
- Hartono, J, 2017. ***Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman***. Edis 6. Yogyakarta: BP.Fakultas Ekonomi UGM.
- Halim, Rudianto, S. 2013. Jurnal: ***Faktor-Faktor Yang mempengaruhi pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah DiKabupaten Tapanuli Selatan***.

- Khasana Uswatun, 2017: Materi Pelatihan Pengelolaan Aset Daerah Menurut Permendagri No 19 Tahun 2016. Yogyakarta.
- Monika, Sutri, K, Dkk, 2015: Abstrak: Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon, FEB-Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Marasabessy Nur Chaidah. 2009."Evaluasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Daerah di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009; Tesis: Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta (tdk terpublikasi)
- Priyono, 2013," Kendala Informasi Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua: Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kab.Sampang,"El.Muhasaba, Volume 4. No.1; 01-2013
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.17 tahun 2007 tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan dari Permendagri No.17 Tahun 2007) Tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 Tentang Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrua bagi Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah.
- Ridwan 2004. ***Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru – Karyawan dan Peneliti Pemula***, Edisi Alfabeta, Bandung, Indonesia.
- Ritonga Taufik, I. 2014: ***Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (PEMDA)***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ritonga Taufik, I, Ehrmann, S. 2016: ***Akutansi Keuangan Pemerintah Daerah Lanjutan***. Pustaka Pelajar - Yogyakarta.

- Sugiono 1999: *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiono 2015: *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Alfabeta Bandung.
- Suyanto 2017. Materi Kuliah: *Akutansi Pemerintah Daerah (Modul Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja)*, Yogyakarta.
- Siregar, (2004) Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO'S Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiana, (2009), Era Baru Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi (Strategie Asset Management"Kontribusi pengelolaan Aset Negara dalam mewujudkan APBN yang Efektif dan Optimal, Jakarta-Kompas
- Sugiana, (2013:15) "Management Aset Pariwisata"Pelayanan berkualitas agar wisatawan puas dan loyal
- Sugiana,(2013), Manajemen ASET PARIWISATA, Guardaya Intimuarta;Bandung

Internet:

- Hadiyanto, Riris. 2009,"Peluang dan Tantangan Peningkatan Pemanfaatan dan Investasi Barang Milik Daerah" <http://asetdaerah.wordpress.com>, Email: riris ddn@yahoo.com diakses pada tanggal, 24 Januari 2018 Pukul.21.15 Wib
- Sohidsutomo.blogspot.com/2013...../DefinisManajemen-Aset.html?m=1 14 September 2017 Pkl.23.46 Wib
- RepublikIndonesia, UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- RepublikIndonesia, UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- RepublikIndonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- RepublikIndonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
- RepublikIndonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

RepublikIndonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah direvisi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

RepublikIndonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

RepublikIndonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

RepublikIndonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

RepublikIndonesia, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

RepublikIndonesia, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi.

RepublikIndonesia, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.